KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, VOl. 6 No. 3 August 2026, 4099-4115
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Logika Kebijakan Kurikulum Berbasis Cinta: Analisis Instrumen Negara dan Kapasitas Preventif terhadap Radikalisasi dalam Pendidikan Madrasah

Atikah Putri Dinanty
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia
Email: atikah@pascasarjana.iainptk.ac.id

Abstract

This study examines the policy logic of the Love-Based Curriculum (Kurikulum Berbasis Cinta/KBC), formalized through the Minister of Religious Affairs Decree Number 1503 of 2025, as a state instrument for preventing radicalization in Indonesian madrasahs. Studies exploring the relationship between policy instruments, the construction of religious moderation, and radicalization processes within curriculum design remain relatively limited. This research employs a qualitative library research approach based on policy document analysis by integrating Christopher Hood's NATO framework, William F. Pinar's Curriculum as Political Text perspective through Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis, and Quintan Wiktorowicz's theory of radicalization processes. The findings indicate that KBC represents a partially coherent policy package, with its strongest dimensions lying in nodality and authority, while gaps remain within the treasure dimension. The Panca Cinta structure also demonstrates conceptual links to stages of radicalization, particularly religious seeking and frame alignment, through dialogical, reflective, and interdisciplinary learning approaches. This study argues that KBC functions not merely as an administrative curriculum, but also as a preventive policy design for strengthening religious moderation in madrasah education.

Keywords: *Love-Based Curriculum, Educational Policy Instrument, Religious Moderation, Radicalization Process, Madrasah Education*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji logika kebijakan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang diresmikan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 sebagai instrumen negara dalam pencegahan radikalisasi di madrasah Indonesia. Kajian mengenai hubungan antara instrumen kebijakan, konstruksi moderasi beragama, dan proses radikalisasi dalam desain kurikulum masih relatif terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* kualitatif berbasis analisis dokumen kebijakan dengan memadukan kerangka NATO dari Christopher Hood, perspektif *Curriculum as Political Text* dari William F. Pinar melalui *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough, serta teori proses radikalisasi dari Quintan Wiktorowicz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBC merupakan *partially coherent policy package* dengan kekuatan utama pada dimensi *nodality* dan *authority*, tetapi masih memiliki kesenjangan pada dimensi *treasure*. Struktur Panca Cinta juga menunjukkan hubungan konseptual dengan tahapan radikalisasi, terutama pada tahap *religious seeking* dan *frame alignment* melalui pendekatan pembelajaran dialogis, reflektif, dan lintas disiplin. Penelitian ini menegaskan bahwa KBC tidak hanya berfungsi sebagai kurikulum administratif, tetapi juga sebagai desain kebijakan preventif dalam penguatan moderasi beragama di madrasah.

Kata Kunci: *Kurikulum Berbasis Cinta, instrumen kebijakan pendidikan, moderasi beragama, proses radikalisasi, pendidikan madrasah***.**

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Terdapat paradoks yang belum sepenuhnya terpecahkan dalam wajah pendidikan Islam Indonesia. Di satu sisi, negara secara konsisten menempatkan lembaga pendidikan sebagai benteng utama dalam pencegahan radikalisme, tetapi di sisi lain sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa institusi yang sama dapat menjadi ruang reproduksi pemahaman keagamaan yang eksklusif dan rentan terhadap infiltrasi ideologi ekstrem. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan lemahnya implementasi pendidikan moderasi, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana instrumen kebijakan pendidikan dirancang dan dioperasikan. Mengikuti kerangka Christopher Hood, pertanyaan pentingnya bukan lagi sekadar apakah pendidikan harus melawan radikalisme, tetapi bagaimana konfigurasi instrumen kebijakan kurikulum dibangun agar mampu bekerja sebagai sistem pencegahan yang lebih terarah dan berkelanjutan.[1]

Radikalisme dalam konteks pendidikan Islam juga tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individual atau penyimpangan pemahaman agama semata. Penelitian tentang proses radikalisasi menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam ideologi ekstrem berkembang melalui tahapan yang bertahap, mulai dari *cognitive opening*, *religious seeking*, *frame alignment*, hingga *socialization*.[2] Tahapan tersebut memperlihatkan bahwa radikalisasi berkaitan erat dengan proses pencarian identitas, kebutuhan akan makna, penerimaan terhadap narasi tertentu, dan keterikatan sosial dengan kelompok tertentu. Karena itu, pendekatan pendidikan yang hanya menekankan penyampaian nilai moderasi secara normatif sering kali tidak cukup untuk menyentuh akar persoalan. Pendidikan membutuhkan desain yang mampu merespons proses kognitif dan sosial peserta didik secara lebih reflektif, dialogis, dan kontekstual.

Perkembangan kajian global menunjukkan bahwa pendidikan semakin diposisikan sebagai strategi penting dalam pencegahan radikalisme berbasis nilai. Kajian bibliometrik mengenai moderasi beragama memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan publikasi paling signifikan dalam isu tersebut, meskipun kajian mengenai mekanisme kebijakan dan desain kurikulum preventif masih relatif terbatas.[3] Di tingkat internasional, penelitian tentang praktik guru pendidikan Islam di Kuwait juga menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan nilai moderasi dalam kurikulum, tetapi pada lemahnya mekanisme yang mampu mentransformasikan nilai tersebut

[1] Christopher Hood, *The Tools of Government* (London: Macmillan, 1983).

[2] Quintan Wiktorowicz, "Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam," in *The Roots of Islamic Radicalism*, ed. unknown (2004): 75–101.

[3] Zamroni et al., "Bibliometric Analysis of Religious Moderation in Islamic Education," *Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2025): 45–67.

menjadi praktik pedagogis yang konsisten.[4] Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan moderasi tidak berhenti pada isi kurikulum, tetapi juga berkaitan dengan desain kebijakan dan sistem implementasinya.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut terlihat lebih kompleks. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam masih cenderung bersifat superfisial, dominan pada level wacana dan kognitif, tetapi belum sepenuhnya menyentuh pembentukan karakter dan pola berpikir peserta didik.[5] Kajian lain juga menunjukkan bahwa program moderasi beragama sering kehilangan dampak jangka panjang ketika tidak didukung desain evaluasi dan implementasi yang sistemik.[6] Selain itu, moderasi masih sering diposisikan sebagai tanggung jawab mata pelajaran agama semata, padahal pembentukan cara berpikir moderat membutuhkan pendekatan lintas disiplin dan pengalaman belajar yang lebih dialogis. Dalam konteks tersebut, efektivitas moderasi baru dapat berkembang ketika nilai *wasathiyah* diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses pembelajaran dan budaya pendidikan.[7]

Berbagai kajian tersebut memperlihatkan adanya tiga kesenjangan utama dalam studi pendidikan moderasi di Indonesia. *Pertama*, masih terdapat jarak antara moderasi sebagai nilai normatif dan moderasi sebagai sistem operasional dalam kebijakan pendidikan. *Kedua*, moderasi masih cenderung dipahami sebagai agenda eksklusif pendidikan agama, bukan sebagai pendekatan lintas disiplin dalam keseluruhan proses pembelajaran. *Ketiga*, kajian yang menghubungkan desain instrumen kebijakan pendidikan dengan proses radikalisasi secara konseptual masih sangat terbatas. Dengan menggunakan kerangka NATO dari Christopher Hood, situasi ini dapat dibaca sebagai kecenderungan kebijakan moderasi yang lebih banyak menekankan *nodality* atau penyebaran narasi moderasi, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh dimensi *authority*, *treasure*, dan *organization* secara terpadu.[8]

Dalam konteks tersebut, kehadiran Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 menjadi perkembangan penting dalam kebijakan pendidikan Islam Indonesia. KBC merupakan perubahan atas KMA Nomor 450 Tahun 2024 dan berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan madrasah, mulai dari Raudlatul Athfal hingga Madrasah Aliyah Kejuruan. Kurikulum ini dibangun di atas dua fondasi utama, yaitu *Deep*

[4] Majed Alabdulhadi and Nabila Alkandari, "Islamic Education Teachers' Practices in Promoting Moderation in Kuwait," *International Journal of Educational Development* 104 (2024): 102–115.

[5] Chotimah et al., "Superficial Implementation of Religious Moderation in Indonesian Islamic Schools," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 15, no. 1 (2025): 1–22.

[6] Mukhibat et al., "Systemic Evaluation Gaps in Religious Moderation Programs," *Jurnal Pendidikan Islam* 30, no. 2 (2024): 135–150.

[7] Siswanto, "Integrating Wasathiyah Values in Islamic Education," *Al-Ta'lim Journal* 27, no. 3 (2020): 210–225.

[8] Hood, *The Tools of Government*; dan Yan, "Revisiting NATO Framework in Policy Analysis," *Policy Sciences* 55, no. 2 (2022): 89–104.

Learning dan Kurikulum Berbasis Cinta, dengan orientasi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih reflektif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Implementasi KBC juga tidak dibatasi pada ruang kelas, tetapi dirancang menjiwai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, hingga budaya madrasah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, KBC dapat dipahami sebagai salah satu upaya negara yang lebih sistematis dalam membangun pendidikan Islam yang mendukung moderasi beragama dan pencegahan radikalisme sejak level pembentukan cara berpikir peserta didik.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas logika kebijakan dan kapasitas preventif KBC masih sangat terbatas. Sebagian penelitian tentang KBC masih berfokus pada deskripsi normatif nilai-nilai Panca Cinta dan implementasi program, sementara kajian kebijakan pendidikan antiradikalisme di Indonesia umumnya hanya menggunakan satu pendekatan analisis. Padahal, memahami KBC tidak cukup hanya membaca isi program, tetapi juga perlu melihat bagaimana negara membangun instrumen kebijakan, mengonstruksi nilai moderasi dalam teks kurikulum, dan menghubungkannya dengan proses radikalisasi secara konseptual. Dalam penelitian ini, kerangka NATO dari Christopher Hood digunakan untuk membaca konfigurasi instrumen kebijakan, perspektif William F. Pinar digunakan untuk memahami kurikulum sebagai teks ideologis, sedangkan model Quintan Wiktorowicz digunakan untuk memetakan tahapan proses radikalisasi.[9]

Berdasarkan ketiga kesenjangan tersebut, penelitian ini dibangun di atas tiga pertanyaan pokok yang saling berkaitan. *Pertama*, bagaimana negara mengkonfigurasi instrumen kebijakan KBC melalui dimensi *nodality*, *authority*, *treasure*, dan *organization* dalam kerangka NATO Christopher Hood, dan apakah konfigurasi tersebut membentuk sebuah paket kebijakan yang koheren. *Kedua*, konstruksi wacana moderasi seperti apa yang dibangun melalui bahasa dan struktur nilai dalam dokumen KBC ketika dibaca menggunakan *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough. *Ketiga*, pada tahapan radikalisasi mana desain KBC bekerja secara konseptual sebagai mekanisme preventif, dan sejauh mana kapasitas intervensinya apabila dipetakan terhadap model proses radikalisasi Quintan Wiktorowicz.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis logika kebijakan Kurikulum Berbasis Cinta sebagai instrumen negara dalam pencegahan radikalisasi di madrasah Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* berbasis analisis dokumen kebijakan karena fokus penelitian diarahkan untuk membangun pembacaan konseptual mengenai logika kebijakan dan kapasitas preventif KBC, bukan mengukur efektivitas empirisnya secara langsung. Data primer penelitian meliputi

[9] William F. Pinar, *What Is Curriculum Theory?* (New York: Routledge, 2012); dan Wiktorowicz, "Joining the Cause."

Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025, Kepdirjen Pendis Nomor 6077 Tahun 2025, serta dokumen implementasi KBC, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan *policy analysis* berkerangka NATO Hood dan *Critical Discourse Analysis* dari Norman Fairclough, sementara proses analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan secara interaktif.[10]

B. Metode Penelitian

Gambar 1. *Kerangka Konseptual Logika Kebijakan Kurikulum Berbasis Cinta*

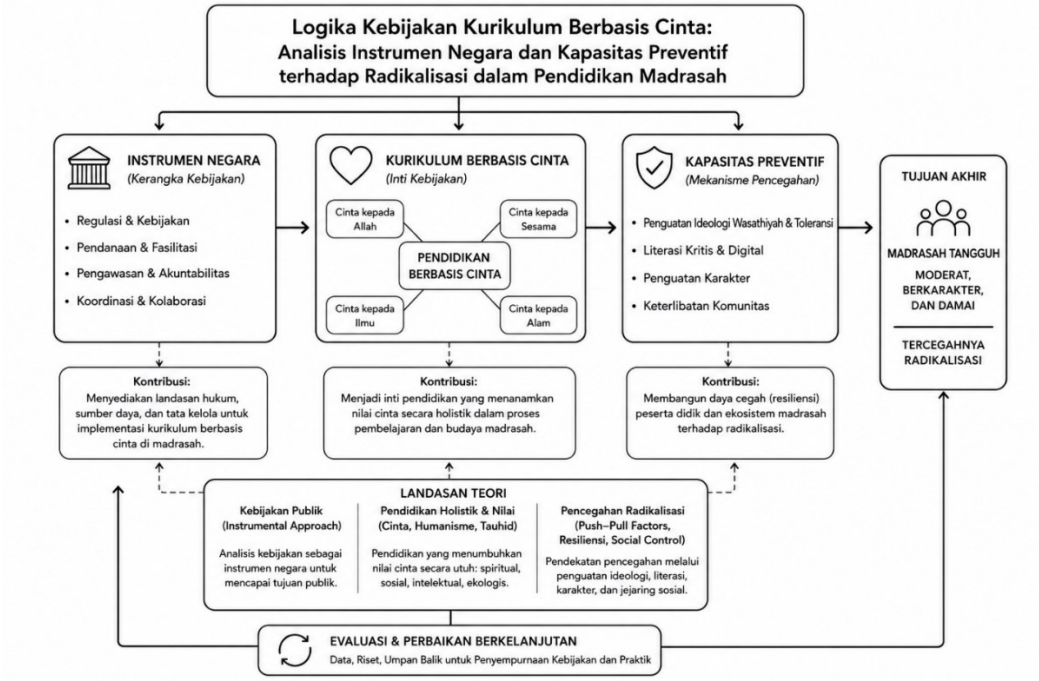

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan sistematis antara tiga pilar utama, yaitu instrumen negara, Kurikulum Berbasis Cinta (KBC), dan kapasitas preventif terhadap radikalisasi dalam pendidikan madrasah. Instrumen negara berfungsi sebagai fondasi kebijakan yang mengarahkan implementasi pendidikan melalui regulasi, tata kelola, pendanaan, pengawasan, dan koordinasi kelembagaan.[11] Kerangka ini sejalan dengan pemikiran Christopher Hood yang menekankan pentingnya konfigurasi instrumen kebijakan *nodality*, *authority*, *treasure*, dan *organization* dalam mencapai tujuan publik secara terarah dan berkelanjutan.[12] Selanjutnya, KBC hadir sebagai inti nilai yang menanamkan moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter secara holistik dalam proses pembelajaran dan budaya madrasah. Kurikulum ini dibangun di atas fondasi cinta kepada Allah, sesama, ilmu

[10] Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40

[11] Christopher Hood, *The Tools of Government* (London: Macmillan, 1983), 1–15.

[12] Hood, *The Tools of Government*, 22–35; dan Yan, "Revisiting NATO Framework in Policy Analysis," *Policy Sciences* 55, no. 2 (2022): 89–104.

pengetahuan, dan alam, yang mencerminkan pendekatan pendidikan humanis dan tauhidik.[13] Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara kognitif, tetapi juga diinternalisasikan melalui pengalaman belajar reflektif dan kontekstual.[14]

Kapasitas preventif madrasah terhadap radikalisasi dibangun melalui penguatan ideologi *wasathiyah*, literasi kritis dan digital, penguatan karakter, serta keterlibatan komunitas pendidikan.[15] Pendekatan ini merespons temuan penelitian bahwa radikalisasi berkembang melalui tahapan bertahap yang melibatkan proses kognitif, pencarian identitas, dan keterikatan sosial. [16]Dengan demikian, KBC dirancang tidak hanya sebagai kurikulum normatif, tetapi sebagai sistem pencegahan yang bekerja pada level pembentukan cara berpikir dan pola relasi sosial peserta didik. Keseluruhan hubungan antara instrumen negara, nilai kurikulum, dan mekanisme preventif tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kebijakan publik, pendidikan holistik, dan teori pencegahan radikalisasi.[17] Kerangka ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam memahami logika kebijakan KBC sebagai instrumen negara yang terintegrasi dalam membangun madrasah tangguh, moderat, berkarakter, dan damai, serta mencegah terjadinya radikalisasi secara lebih sistemik dan berkelanjutan.[18]

C. Pembahasan

1. Kurikulum Berbasis Cinta Sebagai Instrumen Kebijakan Negara

Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen kurikulum administratif biasa. Kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan arah pendidikan Islam di Indonesia yang sejak kemerdekaan terus bergerak dari pola domestikasi menuju pola akomodasi negara terhadap pendidikan Islam. Dalam perkembangan tersebut, negara semakin aktif mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional sekaligus menjadikannya sarana pembentukan karakter sosial-keagamaan. KBC menjadi penting karena negara tidak lagi sekadar berperan sebagai regulator pendidikan, tetapi juga sebagai aktor yang secara sadar membentuk orientasi moderasi beragama melalui madrasah. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan kerangka NATO dari Christopher Hood untuk membaca bagaimana

[13] Siswanto, "Integrating Wasathiyah Values in Islamic Education," *Al-Ta'lim Journal* 27, no. 3 (2020): 210–225.

[14] Chotimah et al., "Superficial Implementation of Religious Moderation in Indonesian Islamic Schools," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 15, no. 1 (2025): 1–22.

[15] Mukhibat et al., "Systemic Evaluation Gaps in Religious Moderation Programs," *Jurnal Pendidikan Islam* 30, no. 2 (2024): 135–150.

[16] Quintan Wiktorowicz, "Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam," in *The Roots of Islamic Radicalism*, ed. unknown (2004): 75–101.

[17] William F. Pinar, *What Is Curriculum Theory?* (New York: Routledge, 2012), 89–112.

[18] Zamroni et al., "Bibliometric Analysis of Religious Moderation in Islamic Education," *Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2025): 45–67.

negara mengoperasikan instrumen kebijakannya melalui dimensi *nodality*, *authority*, *treasure*, dan *organization* dalam implementasi KBC.[19]

Dimensi pertama yang tampak dominan dalam implementasi KBC adalah *nodality*, yaitu kemampuan negara menguasai dan mendistribusikan informasi melalui jaringan birokrasi maupun sosial. Dalam praktiknya, Kementerian Agama menyebarluaskan kebijakan KBC melalui edaran nasional, platform digital, slogan resmi, serta panduan visual yang digunakan secara seragam oleh madrasah di Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menyampaikan informasi administratif, tetapi juga membangun narasi bersama mengenai moderasi beragama dan pendidikan berbasis cinta. Kekuatan *nodality* semakin terlihat ketika Kemenag melibatkan tokoh publik seperti Yudi Latif, Alissa Wahid, Haidar Bagir, dan Fasli Jalal dalam uji publik nasional KBC. Pelibatan figur tersebut memperluas legitimasi kebijakan hingga ke masyarakat sipil dan jaringan Islam moderat di luar birokrasi formal.[20]

Pada dimensi *authority*, KBC memiliki dasar regulasi yang kuat dan berlapis. Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 diterbitkan sebagai perubahan atas KMA Nomor 450 Tahun 2024 dan secara resmi memasukkan pendekatan Kurikulum Berbasis Cinta ke dalam kerangka dasar pendidikan madrasah. Regulasi tersebut diperkuat oleh Kepdirjen Pendis Nomor 6077 Tahun 2025 yang menjelaskan panduan implementasi hingga tingkat satuan pendidikan. Selain itu, Surat Edaran Dirjen Nomor 11 Tahun 2025 juga memperkuat dimensi nasionalisme melalui kewajiban upacara bendera dan lagu kebangsaan di madrasah. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa KBC tidak bersifat simbolik semata, tetapi memiliki daya ikat hukum yang memungkinkan negara mengontrol dan mengevaluasi implementasinya secara formal.

Dimensi *authority* KBC juga diperkuat oleh legitimasi historis dan ideologis yang lebih luas. Kebijakan ini lahir dalam konteks agenda nasional moderasi beragama yang telah menjadi prioritas pemerintah sejak RPJMN 2020–2024 dan diperkuat melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Karena itu, KBC tidak dapat dipisahkan dari strategi negara dalam merespons konservatisme dan intoleransi melalui jalur pendidikan Islam. Pengelolaan pelatihan fasilitator oleh BMBPSDM menunjukkan bahwa KBC bukan hanya agenda teknis

[19] Christopher Hood, *The Tools of Government* (London: Macmillan, 1983); Moh. Kosim et al., "Kebijakan Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): 45–67.

[20] Helen Margetts and Peter John, *Digital Government and Public Policy* (Oxford: Oxford University Press, 2024).

Ditjen Pendidikan Islam, melainkan bagian dari proyek ideologis negara dalam membangun identitas keagamaan moderat. Dalam perspektif teori kurikulum kritis, kurikulum dipahami bukan sekadar perangkat pembelajaran, tetapi arena produksi nilai, identitas, dan orientasi sosial yang dikonstruksi melalui bahasa kebijakan dan praktik pendidikan.[21]

Pada dimensi *treasure*, penelitian menemukan bahwa negara menyediakan dukungan sumber daya yang cukup nyata untuk mendukung implementasi KBC. Dukungan tersebut terlihat melalui penetapan madrasah *pilot project*, pelaksanaan pelatihan fasilitator, pengembangan MOOC PINTAR, serta monitoring implementasi melalui platform MAGIS. Kerja sama dengan program INOVASI Phase III juga memperlihatkan adanya mobilisasi sumber daya eksternal untuk memperluas implementasi kebijakan. Namun demikian, distribusi dukungan tersebut belum sepenuhnya merata karena hanya sebagian kecil madrasah yang memperoleh bantuan langsung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *implementation gap*, terutama bagi madrasah swasta yang memiliki keterbatasan finansial dan sumber daya manusia. Meski begitu, beberapa kajian kebijakan menjelaskan bahwa kesenjangan implementasi tidak selalu menandakan kegagalan kebijakan, tetapi juga dapat membuka ruang adaptasi lokal dan inovasi kontekstual sesuai kebutuhan daerah masing-masing.[22]

Dimensi terakhir adalah *organization*, yaitu kapasitas kelembagaan negara dalam menjalankan kebijakan secara administratif dan operasional. KBC dijalankan melalui struktur yang berlapis mulai dari Ditjen Pendidikan Islam, BMBPSDM, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, hingga kepala madrasah sebagai pelaksana utama di tingkat satuan pendidikan. Implementasi KBC juga tidak hanya ditempatkan dalam ruang kelas, tetapi diintegrasikan ke dalam budaya madrasah melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, literasi, aksi sosial, dan pembiasaan harian peserta didik. Dengan pola tersebut, KBC diarahkan untuk membentuk keseluruhan ekosistem pendidikan madrasah, bukan sekadar menambahkan materi pembelajaran baru. Dalam penelitian kualitatif, pembacaan terhadap organisasi kebijakan seperti ini penting karena kebijakan tidak hanya bekerja melalui teks regulasi, tetapi juga melalui praktik institusional yang membentuk perilaku sosial di tingkat pelaksana.

[21] Mukhibat Mukhibat et al., "Kurikulum dan Konstruksi Identitas Keagamaan," *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 15, no. 1 (2024): 23–41

[22] Paul Cairney, *Understanding Public Policy: Theories and Issues*, 3rd ed. (London: Palgrave Macmillan, 2025).

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa KBC telah memenuhi konfigurasi NATO Hood secara relatif utuh, meskipun kekuatan antar dimensinya belum sepenuhnya seimbang. Dimensi *nodality* dan *authority* menjadi kekuatan utama karena negara memiliki kapasitas besar dalam membangun narasi serta legitimasi regulatif. Sementara itu, dimensi *treasure* masih menjadi titik lemah karena distribusi dukungan sumber daya belum menjangkau seluruh madrasah secara merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KBC bukan sekadar kebijakan simbolik, melainkan instrumen negara yang secara sadar digunakan untuk mengintervensi pendidikan Islam melalui regulasi, distribusi informasi, dukungan sumber daya, dan penguatan organisasi. Dalam perspektif *policy mix*, konfigurasi tersebut dapat disebut sebagai *partially coherent policy*, yaitu ketika seluruh instrumen kebijakan tersedia tetapi belum memiliki tingkat dukungan yang sama kuat dalam implementasinya.[23] Namun, konfigurasi instrumen kebijakan saja belum cukup menjelaskan bagaimana nilai moderasi dibangun dalam teks kurikulum. Karena itu, pembahasan berikutnya diarahkan pada konstruksi wacana moderasi dalam dokumen KBC.

2. Konstruksi Nilai Moderasi dalam Dokumen Kurikulum Berbasis Cinta

Bagian ini bergerak pada pertanyaan yang lebih mendasar, di mana nilai dan cara pandang seperti apa yang sebenarnya dibangun melalui bahasa dalam dokumen KBC. Untuk membaca hal tersebut, penelitian menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) dari Norman Fairclough dengan tiga level analisis, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural.[24] Pendekatan CDA dipilih karena kebijakan tidak pernah netral, bahasa dalam kebijakan selalu membawa nilai, kepentingan, dan orientasi ideologis tertentu. Dalam konteks penelitian ini, CDA tidak digunakan untuk menyerang atau mendeligitimasi KBC, tetapi untuk membaca bagaimana negara membangun narasi moderasi beragama melalui pilihan bahasa, struktur makna, dan strategi komunikasi yang digunakan dalam dokumen kebijakan KBC.

Pada level analisis teks, temuan pertama berkaitan dengan pemilihan kata "cinta" sebagai inti filosofi kurikulum. Secara linguistik, pilihan diksi ini terlihat sederhana, tetapi secara ideologis memiliki makna yang sangat kuat. Selama ini, moderasi beragama di pendidikan Islam sering dipahami hanya sebagai konsep normatif yang disampaikan secara teoritis dan kurang menyentuh dimensi emosional maupun perilaku peserta didik. Dalam konteks tersebut, penggunaan kata "cinta" menjadi strategi yang

[23] Giliberto Capano and Michael Howlett, "The Knowns and Unknowns of Policy Instrument Design," *Policy Sciences* 53, no. 1 (2020): 1–17

[24] Norman Fairclough, *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research* (London: Routledge, 2003).

penting karena mampu menghadirkan moderasi dalam bahasa yang lebih dekat, spiritual, dan mudah diterima berbagai kelompok masyarakat Muslim. Pilihan ini juga berbeda dari penggunaan istilah "toleransi" atau "moderasi" yang dalam sebagian komunitas konservatif masih sering dipersepsikan sebagai istilah yang terlalu politis atau berasal dari luar tradisi Islam. Dalam tradisi Islam sendiri, konsep cinta memiliki akar teologis yang kuat melalui nilai *mahabbah*, *al-Rahman*, dan *al-Wadud* yang menekankan kasih sayang sebagai inti relasi manusia dengan Tuhan dan sesama.[25]

Masih pada level teks, penelitian menemukan bahwa dokumen KBC secara konsisten menggunakan bingkai *rahmatan lil 'alamin* sebagai narasi utama pendidikan Islam. Pilihan *framing* ini tampak dari penggunaan istilah "sesama manusia" (*ukhuwah insaniyah*) yang lebih dominan dibandingkan istilah yang bersifat eksklusif seperti "sesama Muslim" (*ukhuwah Islamiyah*). Pilihan tersebut menunjukkan bahwa dokumen KBC secara sadar membangun cara pandang keberagaman sebagai sesuatu yang harus dirawat, bukan dicurigai. Dalam perspektif moderasi Islam, pendekatan seperti ini sejalan dengan konsep *wasathiyah* yang menempatkan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian penting dari ajaran Islam.[26] Karena itu, *framing rahmatan lil 'alamin* dalam KBC bukan sekadar slogan normatif, melainkan strategi diskursif yang berfungsi membangun orientasi keberagamaan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap pluralitas sosial di Indonesia.

Temuan berikutnya berkaitan dengan struktur nilai Panca Cinta yang menjadi inti KBC. Penelitian menemukan bahwa lima nilai utama dalam Panca Cinta tidak disusun secara acak, tetapi membentuk sistem relasi yang saling melengkapi antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. "Cinta Allah dan Rasul-Nya" merepresentasikan dimensi *hablun minallah*, sementara "Cinta Diri dan Sesama Manusia" serta "Cinta Tanah Air" merepresentasikan *hablun minannas*. Adapun "Cinta Ilmu" dan "Cinta Alam" memperkuat dimensi hubungan manusia dengan pengetahuan dan lingkungan sebagai bagian dari amanah keagamaan. Ketika dipetakan menggunakan indikator moderasi Islam dari Mucharom Syifa, struktur Panca Cinta menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah prinsip moderasi seperti *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, *musawah*, dan *syura*. Hal ini memperlihatkan bahwa moderasi dalam KBC dibangun secara sistematis melalui struktur nilai yang

[25] Chotimah Chotimah et al., "Cinta dalam Pendidikan Islam: Reinterpretasi Nilai Mahabbah," *Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2025): 55–72.

[26] Abdullah Alabdulhadi and Faisal Alkandari, "Wasathiyah in Islamic Education: A Framework for Moderation," *Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (2024): 112–129.

saling berhubungan, bukan sekadar ditempelkan sebagai jargon tambahan dalam kurikulum.

Pada level praktik diskursif, penelitian menemukan bahwa proses penyusunan KBC sendiri merupakan bagian dari strategi legitimasi kebijakan. KBC tidak disusun secara tertutup, tetapi melalui serangkaian uji publik nasional yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Yudi Latif, Alissa Wahid, Haidar Bagir, dan Fasli Jalal. Keterlibatan tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan adanya proses *interdiscursivity*, yaitu pertemuan berbagai wacana seperti kebangsaan, spiritualitas Islam, pendidikan, dan moderasi beragama dalam satu teks kebijakan. Dengan strategi tersebut, KBC dibangun bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai representasi bersama mengenai pendidikan Islam yang dianggap ideal, moderat, dan relevan dengan konteks Indonesia kontemporer. Dalam perspektif CDA, proses produksi teks seperti ini penting karena menentukan bagaimana sebuah kebijakan memperoleh legitimasi sosial dan diterima oleh masyarakat luas.

Temuan lain pada level praktik diskursif menunjukkan adanya hubungan intertekstual yang kuat antara KBC dan kebijakan moderasi beragama Kementerian Agama sebelumnya. Dokumen implementasi KBC secara eksplisit menempatkan dirinya sebagai bagian dari penguatan moderasi beragama dan kebhinekaan di madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa KBC bukan kebijakan yang lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan kelanjutan dari rangkaian kebijakan moderasi beragama sebelumnya, mulai dari KMA tentang Moderasi Beragama hingga Perpres Nomor 58 Tahun 2023. Dalam kerangka CDA, hubungan intertekstual tersebut memperlihatkan bahwa teks KBC secara sadar meneruskan sekaligus memperbarui tradisi wacana moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama. Bedanya, jika sebelumnya moderasi lebih banyak ditempatkan dalam ruang dakwah atau program sosial-keagamaan, KBC justru memindahkannya ke dalam ruang kurikulum dan praktik pembelajaran sehari-hari.[27]

Pada level praktik sosiokultural, penelitian menemukan bahwa pengelolaan pelatihan fasilitator KBC oleh BMBPSDM memiliki makna kelembagaan yang penting. Fakta bahwa pelatihan tidak hanya berada di bawah Ditjen Pendidikan Islam menunjukkan bahwa KBC diposisikan bukan sekadar program kurikulum teknis, tetapi bagian dari agenda strategis moderasi beragama negara. Dalam konteks tersebut, KBC merepresentasikan model implementasi moderasi yang lebih luas karena tidak hanya

[27] Burhanuddin Burhanuddin and Muhammad Ilmi, "Diskursus Moderasi Beragama dalam Kebijakan Kemenag," *Jurnal Ilmu Sosial dan Agama* 9, no. 1 (2022): 87–102.

menyentuh mata pelajaran agama, tetapi juga budaya madrasah, kegiatan kokurikuler, dan pembentukan karakter sosial peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa negara sedang berupaya menggeser moderasi beragama dari sekadar wacana normatif menuju praktik sosial yang nyata dalam kehidupan pendidikan sehari-hari. Strategi penggunaan istilah "cinta" juga menunjukkan adanya penyesuaian bahasa kebijakan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim yang beragam tanpa memunculkan resistensi ideologis yang tidak perlu.[28]

Secara keseluruhan, analisis tiga level CDA menunjukkan bahwa dokumen KBC membangun konstruksi moderasi melalui pilihan bahasa, struktur nilai, proses legitimasi, dan strategi kelembagaan yang saling mendukung. Dengan mengacu pada pandangan William F. Pinar bahwa kurikulum adalah representasi tentang apa yang dipilih untuk diingat, dipercaya, dan diwariskan kepada generasi berikutnya, KBC secara konsisten membangun narasi Islam Indonesia yang menonjolkan kasih sayang, reflektivitas, kebangsaan, dan inklusivitas. Pada saat yang sama, dokumen ini secara sistematis tidak memberi ruang dominan pada narasi eksklusivisme, formalisasi syariat secara kaku, maupun pemahaman literal yang sering menjadi pintu masuk radikalisme. Dalam konteks tersebut, KBC menunjukkan upaya menghadirkan pendidikan Islam yang menekankan dialog, refleksi, dan sikap moderat melalui integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam proses pembelajaran.[29]

3. Desain Preventif Kurikulum Berbasis Cinta

Pada titik mana desain KBC bekerja mengintervensi proses radikalisasi, dan sejauh mana kapasitas intervensinya. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian menggunakan model proses radikalisasi dari Quintan Wiktorowicz sebagai lensa diagnostik untuk memetakan tahapan radikalisasi secara lebih presisi. Model ini membagi proses radikalisasi ke dalam empat tahap, yaitu *cognitive opening*, *religious seeking*, *frame alignment*, dan *socialization*. Penggunaan model tersebut menjadi relevan karena radikalisasi tidak lahir dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor psikologis, sosial, ideologis, dan lingkungan yang saling memengaruhi. Temuan tersebut sejalan dengan tinjauan sistematis terhadap ratusan penelitian empiris yang menunjukkan bahwa kerentanan terhadap ekstremisme

[28] Setiyawan Setiyawan et al., "Strategi Bahasa Kebijakan dalam Moderasi Beragama," *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2025): 34–50.

[29] Siswanto Siswanto, "Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2020): 99–115.

berkembang melalui proses yang bertahap dan berlapis, bukan melalui sebab tunggal yang sederhana.[30]

Tahap pertama dalam model Wiktorowicz adalah *cognitive opening*, yaitu momen ketika individu mengalami krisis identitas, tekanan psikologis, atau kehilangan rasa aman sehingga menjadi lebih terbuka terhadap narasi baru yang menawarkan kepastian dan penerimaan. Penelitian ini menemukan bahwa nilai "Cinta Diri dan Sesama" dalam desain Panca Cinta KBC diarahkan untuk merespons kerentanan pada tahap tersebut. Dokumen implementasi KBC menempatkan *self-compassion*, pengelolaan emosi, dan penguatan hubungan sosial sebagai bagian penting dari proses pendidikan di madrasah. Dalam konteks ini, KBC tidak hanya berbicara mengenai pendidikan karakter secara normatif, tetapi mencoba membangun *psychological safety* bagi peserta didik melalui lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif. Ketika peserta didik merasa diterima, dihargai, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungan madrasah, maka peluang berkembangnya kerentanan psikologis yang dapat dimanfaatkan kelompok radikal menjadi lebih kecil.[31]

Temuan penting lainnya pada tahap *cognitive opening* adalah penempatan konsep "Madrasah Ramah Anak" sebagai salah satu indikator utama keberhasilan implementasi KBC. Pendekatan ini menunjukkan bahwa madrasah tidak hanya dipahami sebagai ruang transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membangun rasa aman dan penghargaan terhadap peserta didik. Penelitian tentang ketahanan terhadap radikalisasi di sekolah menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang memperlakukan peserta didik secara setara, responsif terhadap persoalan sosial, dan membangun budaya saling menghormati memiliki hubungan signifikan dengan rendahnya kecenderungan ekstremisme. Dalam konteks KBC, nilai *musawah* tercermin dalam perlakuan setara terhadap peserta didik, sedangkan nilai *ukhuwah insaniyah* tercermin dalam pendekatan pembelajaran berbasis kasih sayang. Dengan demikian, desain KBC secara konseptual memiliki kesesuaian dengan berbagai faktor protektif yang terbukti mampu memperkuat ketahanan peserta didik terhadap proses radikalisasi awal.

Tahap kedua dalam model Wiktorowicz adalah *religious seeking*, yaitu fase ketika individu mulai mencari makna, identitas, dan orientasi hidup melalui simbol maupun pemahaman keagamaan. Pada tahap ini, kurikulum memiliki posisi yang sangat strategis

[30] Allard R. Feddes et al., "A Systematic Review of Empirical Studies on Radicalization," *Terrorism and Political Violence* 35, no. 2 (2023): 213–233.

[31] Liat Eldor et al., "Psychological Safety and Resilience in Educational Settings," *Educational Psychology Review* 34, no. 1 (2022): 45–68.

karena cara agama diperkenalkan akan memengaruhi arah perkembangan pemahaman peserta didik. Penelitian ini menemukan bahwa nilai "Cinta Allah dan Rasul-Nya" dalam KBC dibangun melalui kerangka *rahmatan lil 'alamin* dan prinsip kasih sayang universal, bukan melalui pendekatan eksklusif atau literalistik. Perbedaan pendekatan tersebut menjadi penting karena individu yang sedang berada pada fase *religious seeking* cenderung membutuhkan jawaban spiritual yang memberikan rasa makna dan keterhubungan sosial. KBC mencoba merespons kebutuhan tersebut dengan menghadirkan pemahaman agama yang reflektif, dialogis, dan kontekstual melalui pendekatan *deep learning* yang tidak berhenti pada hafalan teks semata.

Kapasitas intervensi KBC pada tahap *religious seeking* juga diperkuat oleh pendekatan moderasi beragama yang diintegrasikan secara lintas disiplin. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan moderasi beragama akan lebih efektif ketika nilai-nilai *wasathiyah* tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran agama, tetapi diintegrasikan melalui pembelajaran dialogis, *problem solving*, diskusi kritis, dan pengalaman belajar lintas bidang studi.[32] Temuan ini sesuai dengan desain KBC yang mengintegrasikan nilai Panca Cinta ke dalam keseluruhan proses pembelajaran di madrasah. Dengan pola tersebut, peserta didik tidak hanya menerima nilai moderasi sebagai konsep normatif, tetapi mengalami dan mendiskusikannya secara langsung dalam berbagai ruang belajar. Pendekatan semacam ini memungkinkan peserta didik membangun kerangka makna keagamaan yang lebih terbuka, reflektif, dan tidak mudah dipengaruhi oleh narasi ekstremisme yang simplistik.

Tahap berikutnya adalah *frame alignment*, yaitu kondisi ketika individu mulai menerima narasi dunia yang dibangun secara dikotomis oleh kelompok radikal, seperti "kita versus mereka" atau "agama versus musuh agama". Pada tahap ini, kemampuan berpikir kritis menjadi faktor penting untuk mencegah penerimaan narasi radikal secara mentah. Penelitian menemukan bahwa nilai "Cinta Ilmu" dalam KBC berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat kemampuan reflektif dan evaluatif peserta didik melalui pendekatan *deep learning*. Peserta didik tidak hanya diarahkan untuk menerima informasi, tetapi juga dilatih untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai klaim yang mereka temui, termasuk narasi keagamaan di media sosial dan ruang digital. Penelitian mengenai pendidikan Islam kritis di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran kritis terhadap sumber pembelajaran agama dan media digital

[32] Prasetyo Prasetyo et al., "Integrasi Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Lintas Disiplin," *Jurnal Pendidikan Multikultural* 8, no. 1 (2025): 15–30.

berkontribusi terhadap penurunan kerentanan terhadap narasi ekstremis.[33] Dengan demikian, KBC tidak hanya membangun moderasi secara moral, tetapi juga memperkuat ketahanan kognitif peserta didik terhadap manipulasi ideologis.

Temuan yang paling orisinal dalam penelitian ini justru terlihat pada desain kokurikuler lintas disiplin KBC. Dokumen implementasi KBC secara eksplisit mengharuskan keterlibatan lebih dari satu mata pelajaran dalam setiap program kokurikuler berbasis Panca Cinta. Desain tersebut memiliki makna penting karena radikalisasi pada tahap *frame alignment* sering berkembang melalui pola pikir tunggal dan tertutup. Dengan membiasakan peserta didik melihat persoalan dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, KBC secara tidak langsung membangun kebiasaan berpikir multidimensional yang berlawanan dengan logika ekstremisme yang kaku dan hitam-putih. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian eksperimental mengenai pendidikan agama Islam berbasis multikultural yang menunjukkan bahwa pendekatan multikultural memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan kecenderungan radikalisasi, khususnya pada tahap awal pembentukan pola pikir ekstrem.

Tahap terakhir dalam model Wiktorowicz adalah *socialization*, yaitu proses pembentukan identitas dan loyalitas individu melalui keterikatan dengan komunitas tertentu. Pada tahap ini, kelompok radikal biasanya bekerja melalui rasa memiliki, solidaritas kelompok, dan identitas kolektif yang eksklusif. Penelitian ini menemukan bahwa KBC mencoba membangun komunitas alternatif melalui budaya madrasah yang inklusif dan berbasis nilai kebersamaan. Nilai "Cinta Tanah Air" dalam KBC memainkan peran penting karena menawarkan identitas kolektif sebagai warga Indonesia yang majemuk dan saling menghargai. Dengan menjadikan seluruh ekosistem madrasah sebagai ruang pembentukan identitas moderat, KBC tidak hanya bekerja pada level pembelajaran formal, tetapi juga pada level budaya sosial peserta didik. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas intervensi pada tahap *socialization* sangat bergantung pada konsistensi implementasi di setiap madrasah, sementara dukungan sumber daya dan kualitas pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya merata.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) tidak hanya berfungsi sebagai dokumen kurikulum administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam pencegahan radikalisasi di madrasah. Dengan menggunakan kerangka NATO

[33] Ju'subaidi Ju'subaidi et al., "Pendidikan Islam Kritis dan Kesadaran Digital," *Jurnal Pendidikan dan Media Sosial* 6, no. 1 (2025): 1–18.

dari Christopher Hood, ditemukan bahwa KBC dikonfigurasi melalui empat dimensi kebijakan, yaitu *nodality, authority, treasure,* dan *organization*. Dimensi *nodality* tampak melalui distribusi kebijakan secara masif dan pelibatan tokoh Islam moderat dalam uji publik nasional, sedangkan *authority* diperkuat melalui rantai regulasi dari Perpres Nomor 58 Tahun 2023 hingga Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025. Sementara itu, dimensi *treasure* dan *organization* terlihat melalui dukungan pelatihan, platform digital, pilot project, dan struktur kelembagaan berlapis. Temuan ini menunjukkan bahwa KBC merupakan *partially coherent policy package* yang relatif kuat pada aspek legitimasi dan distribusi narasi moderasi, tetapi masih menghadapi kesenjangan implementasi pada aspek sumber daya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai moderasi dalam KBC dibangun melalui konstruksi wacana yang sistematis dan memiliki hubungan konseptual dengan tahapan proses radikalisasi dari Quintan Wiktorowicz. Melalui pendekatan *Critical Discourse Analysis* dari Norman Fairclough, ditemukan bahwa diksi "cinta", framing *rahmatan lil 'alamin*, dan struktur Panca Cinta digunakan untuk membangun orientasi keberagamaan yang inklusif, reflektif, dan dialogis. Secara konseptual, "Cinta Diri dan Sesama" diarahkan untuk memperkuat *psychological safety* pada tahap *cognitive opening*, "Cinta Allah dan Rasul-Nya" merespons *religious seeking*, "Cinta Ilmu" memperkuat kemampuan kritis pada tahap *frame alignment*, sedangkan "Cinta Tanah Air" membangun identitas kolektif inklusif sebagai respons terhadap *socialization*. Namun demikian, seluruh temuan ini masih bersifat konseptual-inferensial sehingga memerlukan penelitian empiris lanjutan untuk menguji efektivitas implementasinya di lapangan.

Referensi

Alabdulhadi, Abdullah, and Faisal Alkandari. "Wasathiyah in Islamic Education: A Framework for Moderation." *Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (2024): 112–129.

Burhanuddin, Burhanuddin, and Muhammad Ilmi. "Diskursus Moderasi Beragama dalam Kebijakan Kemenag." *Jurnal Ilmu Sosial dan Agama* 9, no. 1 (2022): 87–102.

Cairney, Paul. *Understanding Public Policy: Theories and Issues*. 3rd ed. London: Palgrave Macmillan, 2025.

Capano, Giliberto, and Michael Howlett. "The Knowns and Unknowns of Policy Instrument Design." *Policy Sciences* 53, no. 1 (2020): 1–17.

Chotimah, Chotimah, et al. "Cinta dalam Pendidikan Islam: Reinterpretasi Nilai Mahabbah." *Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2025): 55–72.

Eldor, Liat, et al. "Psychological Safety and Resilience in Educational Settings." *Educational Psychology Review* 34, no. 1 (2022): 45–68.

Fairclough, Norman. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge, 2003.

Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. 2nd ed. London: Routledge, 2013.

Feddes, Allard R., et al. "A Systematic Review of Empirical Studies on Radicalization." *Terrorism and Political Violence* 35, no. 2 (2023): 213–233.

Hood, Christopher. *The Tools of Government*. London: Macmillan, 1983.

Ju'subaidi, Ju'subaidi, et al. "Pendidikan Islam Kritis dan Kesadaran Digital." *Jurnal Pendidikan dan Media Sosial* 6, no. 1 (2025): 1–18.

Kosim, Moh., et al. "Kebijakan Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): 45–67.

Margetts, Helen, and Peter John. *Digital Government and Public Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2024.

Mukhibat, Mukhibat, et al. "Kurikulum dan Konstruksi Identitas Keagamaan." *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 15, no. 1 (2024): 23–41.

Pinar, William F. *What Is Curriculum Theory?* 2nd ed. New York: Routledge, 2012.

Prasetyo, Prasetyo, et al. "Integrasi Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Lintas Disiplin." *Jurnal Pendidikan Multikultural* 8, no. 1 (2025): 15–30.

Setiyawan, Setiyawan, et al. "Strategi Bahasa Kebijakan dalam Moderasi Beragama." *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2025): 34–50.

Siswanto, Siswanto. "Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2020): 99–115.

Syifa, Mucharom. *Moderasi Islam: Indikator dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2020.

Wiktorowicz, Quintan. *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*. Bloomington: Indiana University Press, 2004.

Yan, Wang. "Policy Mix and Implementation Coherence." *Journal of Public Policy* 42, no. 2 (2022): 310–330.